

Pagar Nusantara Keamanan Maritim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pagar Nusantara Keamanan Maritim

Ridha Munawir Masly Pandoe

Rachmat Setia Wibawa

Harri Dolli Hutabara

Guntur Eko Saputro

Lukman Yudho Prakoso

Koko Komarudin



Pagar Nusantara Keamanan Maritim

Copyright © Historie Media

ISBN: 978-634-96764-7-2
978-634-96764-8-9 (PDF)

Cetakan Pertama: February 2026
Tebal: 141 hlm; 15,5 cm x 23 cm

Penulis : **Ridha Munawir Masly Pandoe**
Rachmat Setia Wibawa
Harri Dolli Hutabara
Guntur Eko Saputro
Lukman Yudho Prakoso
Koko Komarudin
Editor : **Aryobimo Bharadian**
Faminullah Faujan
Rizki Putry

Layouter : Fany Nafira
Desain Cover : Sendi Gustiawasn Saputra

Email : historiemedia@gmail.com
Website : historiemedia.com
Instagram : [@historie_media](https://www.instagram.com/historie_media)
Facebook : Historie Media
WhatsApp : 0851-7691-7910

Penerbit:
Historie Media

Kantor Pusat:
Komplek Muntangsari No.81, Banjarnegara, Jawa Tengah

Kantor Operasional:
Perumahan Graha Tavisha No.G1, Purwokerto, Jawa Tengah

© Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku *Pagar Nusantara: Keamanan Maritim* disusun sebagai kontribusi pemikiran strategis dalam memahami dan memperkuat keamanan laut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Konsep *Pagar Nusantara* memandang laut, pesisir, dan pulau-pulau terluar bukan sekadar ruang geografis, melainkan sebagai sistem pertahanan berlapis yang berperan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta kepentingan nasional.

Di tengah dinamika lingkungan strategis global dan regional, ancaman maritim semakin beragam, mencakup ancaman militer dan nonmiliter, kejahatan lintas negara, pelanggaran batas wilayah, terorisme maritim, hingga ancaman hibrida berbasis siber dan teknologi canggih. Oleh karena itu, keamanan maritim menuntut pendekatan terpadu yang mengintegrasikan kekuatan militer, instrumen nonmiliter, teknologi pengawasan, intelijen, serta partisipasi masyarakat pesisir.

Buku ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis bagi pemangku kepentingan pertahanan, keamanan, dan kemaritiman dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna mewujudkan *Pagar Nusantara* sebagai fondasi ketahanan maritim Indonesia.

Jakarta, Januari 2026

Ridha Munawir Masly Pandoe

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vi

BAB 1 PAGAR NUSANTARA DAN KERANGKA KONSEPTUAL KEAMANAN MARITIM 1

- A. Konsep Pagar Nusantara sebagai Arsitektur Keamanan Negara Kepulauan..... 1
- B. Matriks Keamanan Maritim menurut Christian Bueger 6
- C. Keamanan Maritim dalam Sistem Keamanan Nasional Indonesia 11
- D. Pagar Nusantara dalam Perspektif Grand Strategy Nasional 15
- E. Kekayaan Maritim Indonesia sebagai Kepentingan Strategis Nasional..... 20
- F. Relevansi Pagar Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045 ... 23

BAB 2 LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL DAN DINAMIKA KEAMANAN MARITIM 29

- A. Perkembangan Lingkungan Strategis Global Kontemporer . 29
- B. Konflik Global dan Perebutan Sumber Daya Alam 32
- C. Intervensi Militer dan Tekanan Geopolitik Global..... 35
- D. Ancaman Tradisional dalam Domain Maritim..... 38
- E. Ancaman Nontradisional dan Hibrida 41
- F. Implikasi Lingkungan Strategis Global bagi Pagar Nusantara 44

**BAB 3 PAGAR NUSANTARA DALAM KERANGKA GRAND,
MIDDLE, DAN APPLIED THEORY49**

- A. Grand Theory: Keamanan Maritim dan Ketahanan Nasional 49
- B. Middle Theory: Maritime Security Governance..... 53
- C. Applied Theory: Operasionalisasi Pagar Nusantara..... 56
- D. Integrasi Matriks Keamanan Maritim Bueger dalam
Kebijakan Nasional..... 59
- D. Integrasi Matriks Keamanan Maritim Bueger dalam
Kebijakan Nasional..... 62
- F. Evaluasi Konseptual terhadap Tantangan Masa Depan..... 65

**BAB 4 TEKNOLOGI, DIGITALISASI, DAN INTELIJEN
DALAM PAGAR NUSANTARA.....69**

- A. Artificial Intelligence (AI) dalam Keamanan Maritim 69
- B. Cyber Security sebagai Dimensi Baru Keamanan Maritim ... 73
- C. Drone, Satelit, dan Sistem Pengawasan Maritim 76
- D. Digitalisasi dan Integrasi Data Keamanan Maritim 79
- E. Intelijen Maritim Berbasis Teknologi 82
- F. Risiko Teknologi dan Ancaman Asimetris 85

**BAB 5 PERTAHANAN GABUNGAN MILITER–NONMILITER
DALAM PAGAR NUSANTARA.....89**

- A. Konsep Pertahanan Gabungan dalam Domain Maritim 89
- B. Peran Aktor Nonmiliter dalam Keamanan Maritim 91
- C. Pagar Nusantara dalam Operasi Militer Perang (OMP)..... 94
- D. Pagar Nusantara dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
..... 96
- E. Whole of Government dan Whole of Nation Approach..... 99

| | |
|---|-----|
| F. Pembelajaran dari Konflik Maritim Global | 101 |
|---|-----|

**BAB 6 MASA DEPAN PAGAR NUSANTARA DAN PROYEKSI
ANCAMAN MARITIM..... 105**

| | |
|--|-----|
| A. Proyeksi Ancaman Tradisional dan Nontradisional Masa Depan | 105 |
| B. Pagar Nusantara dan Ketahanan Sumber Daya Nasional ... | 107 |
| C. Konflik Global Masa Depan dan Dampaknya bagi Indonesia | 109 |
| D. Transformasi Kebijakan Keamanan Maritim Nasional | 111 |
| E. Peran Indonesia dalam Keamanan Maritim Regional dan Global | 113 |
| F. Pagar Nusantara sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045.... | 115 |

DAFTAR PUSTAKA..... 118

PROFIL PENULIS..... 120

BAB 1

PAGAR NUSANTARA DAN KERANGKA KONSEPTUAL KEAMANAN MARITIM

A. Konsep Pagar Nusantara sebagai Arsitektur Keamanan Negara Kepulauan



Gambar 1.1 Ilustrasi Konsep seni futuristik 'Pagar Nusantara', perisai energi berteknologi tinggi yang bercahaya membentuk pagar pelindung di sekitar peta holografik kepulauan Indonesia, kapal perang angkatan laut Indonesia dan pesawat futuristik berpatroli di sepanjang penghalang bercahaya, gaya sinematik, pencahayaan dramatis, kesan perlindungan yang kuat, teks “PAGAR NUSANTARA” terintegrasi ke dalam visual (AI, 2026)

1. Negara Kepulauan dan Tantangan Keamanan Maritim

Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus kompleks. Dengan lebih

dari 17.000 pulau, garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan, keamanan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keamanan maritim. Dalam konteks ini, laut bukan sekadar ruang ekonomi dan transportasi, melainkan **ruang strategis pertahanan** yang menentukan eksistensi negara.

Lukman Yudho Prakoso menegaskan bahwa paradigma keamanan Indonesia harus berangkat dari kesadaran bahwa **ancaman utama terhadap kedaulatan Indonesia justru datang dari laut**, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nonmiliter (Prakoso, 2020). Oleh karena itu, konsep pertahanan yang bersifat teritorial-darat semata tidak lagi relevan menghadapi dinamika keamanan kontemporer.

Konsep *Pagar Nusantara* lahir dari kebutuhan untuk membangun **arsitektur keamanan maritim yang sesuai dengan karakter negara kepulauan**, di mana laut diposisikan sebagai lapisan pertahanan utama, bukan sebagai celah kerentanan.

2. Definisi Konseptual Pagar Nusantara

Pagar Nusantara bukanlah pagar fisik, melainkan **kerangka konseptual dan operasional** yang memandang seluruh wilayah laut, pesisir, pulau-pulau terluar, serta ruang udara di atasnya sebagai **sistem pertahanan berlapis (layered defense system)**. Konsep ini mengintegrasikan tiga elemen utama:

a. **Geografi**

Laut, selat, ALKI, ZEE, pulau terluar, dan chokepoints sebagai lapisan alami pertahanan.

b. **Teknologi**

Sistem pengawasan maritim, satelit, radar, AIS, drone, AI, cyber defense, dan sistem informasi geospasial.

c. **Kekuatan Nasional.** Sinergi kekuatan militer dan nonmiliter, negara dan masyarakat, pusat dan daerah.

Dalam perspektif ini, Pagar Nusantara berfungsi sebagai **mekanisme pencegahan (deterrence)**, **deteksi dini (early warning)**, dan **respons terpadu** terhadap berbagai spektrum ancaman maritim.

Prakoso (2021) menyebut pendekatan ini sebagai bentuk aktualisasi **Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)** dalam domain maritim, di mana seluruh komponen bangsa menjadi bagian dari sistem pertahanan.

3. Pagar Nusantara sebagai Sistem Pertahanan Berlapis



Gambar 1.2 Ilustrasi Konsep seni epik dari perspektif 'Strategi Besar Nasional', ruang komando futuristik yang remang-remang, perwira militer Indonesia berpangkat tinggi sebagai siluet di sekitar meja holografik besar, meja tersebut menampilkan peta detail Indonesia dan laut sekitarnya dengan garis dan penanda bercahaya yang menunjukkan pergerakan armada strategis dan alokasi sumber daya, suasana serius, menyampaikan pandangan jauh ke depan dan perencanaan skala besar (AI, 2026)

Konsep pertahanan berlapis dalam Pagar Nusantara dapat dijelaskan melalui beberapa lapisan strategis:

Lapisan Pertama (Outer Layer). Meliputi ZEE Indonesia, laut lepas yang berbatasan langsung dengan negara lain, serta ruang udara di atasnya. Pada lapisan ini, fungsi utama adalah:

- a. Deterrence strategis
- b. Pengawasan jarak jauh
- c. Diplomasi pertahanan maritim

Lapisan Kedua (Middle Layer). Mencakup perairan kepulauan, ALKI, dan selat strategis. Fungsi utamanya:

- a. Kontrol lalu lintas laut
- b. Penegakan hukum
- c. Pencegahan kejahatan lintas negara

Lapisan Ketiga (Inner Layer). Meliputi pesisir, pelabuhan strategis, dan wilayah hinterland. Fokusnya:

- a. Perlindungan objek vital nasional
- b. Keamanan logistik
- c. Ketahanan ekonomi maritim

Struktur berlapis ini sejalan dengan pemikiran **maritime domain awareness (MDA)** modern yang menekankan penguasaan informasi menyeluruh terhadap aktivitas di laut (Bueger, 2015).

4. Integrasi Geografi dalam Arsitektur Keamanan

Keunggulan utama Indonesia dalam membangun Pagar Nusantara terletak pada **geografi strategisnya**. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar merupakan jalur vital perdagangan global. Jika dikelola secara strategis, jalur-jalur ini bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga **instrumen geopolitik dan keamanan nasional**.

Lukman Yudho Prakoso menekankan bahwa penguasaan ruang maritim harus dipahami sebagai **penguasaan ruang hidup bangsa** (Prakoso, 2019). Tanpa kontrol efektif terhadap laut, kedaulatan negara kepulauan akan selalu berada dalam posisi rentan.

Dalam konteks Pagar Nusantara, geografi tidak bersifat pasif, melainkan **diaktifkan melalui kebijakan, teknologi, dan kehadiran negara**.

5. Teknologi sebagai Tulang Punggung Pagar Nusantara

Pagar Nusantara tidak mungkin efektif tanpa dukungan teknologi. Transformasi ancaman dari konvensional menjadi **asimetris, hibrida, dan berbasis teknologi** menuntut sistem keamanan yang adaptif. Teknologi yang berperan sentral meliputi:

- a. **Artificial Intelligence (AI)** untuk analisis pola ancaman
- b. **Drone dan sistem tanpa awak** untuk pengawasan berkelanjutan
- c. **Satelit dan radar maritim** untuk deteksi lintas batas
- d. **Cyber security** untuk melindungi sistem navigasi dan command center
- e. **Big data dan integrasi C4ISR**

Prakoso (2022) menegaskan bahwa kegagalan negara menguasai teknologi maritim akan menjadikan laut sebagai ruang penetrasi ancaman, bukan ruang pertahanan.

6. Kekuatan Nasional: Militer dan Nonmiliter

Keunikan Pagar Nusantara terletak pada **pendekatan pertahanan gabungan militer-nonmiliter**. TNI AL dan TNI AU berperan sebagai garda depan, namun efektivitas keamanan maritim sangat bergantung pada:

- a. Bakamla
- b. KKP
- c. Polair
- d. Bea Cukai
- e. Pemerintah daerah
- f. Masyarakat pesisir dan nelayan

Pendekatan ini mencerminkan **whole of government** dan **whole of nation approach**, yang relevan menghadapi ancaman nontradisional seperti IUU fishing, penyelundupan, dan terorisme maritim.

7. Signifikansi Strategis Pagar Nusantara

Secara konseptual, Pagar Nusantara merupakan:

- a. **Arsitektur keamanan nasional berbasis maritim**
- b. **Instrumen deterrence strategis**
- c. **Platform integrasi kebijakan, teknologi, dan kekuatan nasional**

Konsep ini menjembatani kepentingan pertahanan dan pembangunan, serta menjadi fondasi bagi ketahanan nasional jangka panjang.

B. Matriks Keamanan Maritim menurut Christian Bueger

1. Latar Belakang Konseptual Matriks Keamanan Maritim

Diskursus keamanan maritim dalam kajian strategis kontemporer mengalami perluasan makna yang signifikan. Keamanan maritim tidak lagi dipahami semata sebagai isu pertahanan laut atau kekuatan angkatan laut (*naval power*), melainkan sebagai **ruang konseptual multidimensi** yang mencakup keselamatan, keamanan, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola laut. Salah satu kontribusi konseptual paling berpengaruh dalam diskursus ini dikemukakan oleh **Christian Bueger**, yang merumuskan **Matriks Keamanan Maritim (Maritime Security Matrix)**.

Bueger (2015) mengkritik pendekatan sempit keamanan maritim yang hanya berfokus pada ancaman militer dan perompakan. Ia mengajukan kerangka analisis yang menempatkan keamanan maritim sebagai **persilangan (intersection)** dari empat klaster utama, yaitu **Sea Power, Maritime Safety, Maritime Security,**

dan **Blue Economy**. Matriks ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kompleksitas ancaman maritim modern.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, matriks Bueger sangat relevan untuk menjelaskan mengapa konsep **Pagar Nusantara** tidak dapat dibangun hanya dengan pendekatan militeristik, melainkan harus memadukan dimensi keamanan, keselamatan, ekonomi, dan kekuatan negara secara terpadu.

2. Sea Power: Kekuatan Negara di Laut sebagai Fondasi Pagar Nusantara

Klaster pertama dalam matriks Bueger adalah **Sea Power**, yang merujuk pada kemampuan negara untuk menggunakan laut sebagai instrumen kekuasaan nasional. Sea power mencakup kekuatan militer laut, kontrol jalur laut, diplomasi maritim, serta kemampuan negara memproyeksikan kekuatan dan pengaruh di domain maritim. Lukman Yudho Prakoso menegaskan bahwa bagi Indonesia, sea power bukanlah pilihan, melainkan **keharusan strategis** (Prakoso, 2019). Sebagai negara kepulauan, kegagalan membangun sea power akan menyebabkan Indonesia kehilangan kendali atas ruang hidupnya sendiri. Dalam kerangka Pagar Nusantara, sea power berfungsi sebagai **lapisan deterensi utama** terhadap ancaman tradisional seperti:

- a. Pelanggaran wilayah
- b. Konflik antarnegara
- c. Eskalasi kekuatan laut asing di kawasan

Namun, berbeda dengan konsep sea power klasik ala Mahan yang menekankan dominasi armada laut, Pagar Nusantara memaknai sea power secara lebih luas, yaitu sebagai **kemampuan mengelola dan mengamankan ruang laut secara berkelanjutan** melalui integrasi kekuatan militer, teknologi, dan diplomasi.

Dalam konteks lingkungan strategis global, sea power juga terkait dengan rivalitas kekuatan besar dan konflik perebutan sumber daya.

Tekanan geopolitik Amerika Serikat terhadap Venezuela, misalnya, menunjukkan bagaimana kepentingan energi dan kontrol jalur strategis laut menjadi faktor utama dalam dinamika konflik modern. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi peringatan bahwa **kekayaan maritim tanpa perlindungan sea power akan mengundang intervensi eksternal**.

3. Maritime Safety: Keselamatan sebagai Pilar Stabilitas Maritim

Klaster kedua adalah **Maritime Safety**, yang mencakup keselamatan pelayaran, pencegahan kecelakaan laut, perlindungan lingkungan laut, serta kesiapsiagaan terhadap bencana maritim. Bueger menempatkan maritime safety sebagai elemen kunci karena kegagalan dalam keselamatan laut dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, maritime safety memiliki arti strategis karena:

- a. Indonesia merupakan jalur utama perdagangan dunia
- b. Tingginya intensitas lalu lintas laut di ALKI
- c. Kerentanan terhadap kecelakaan, tumpahan minyak, dan bencana alam

Prakoso (2020) menekankan bahwa gangguan terhadap keselamatan pelayaran bukan sekadar isu teknis, tetapi **ancaman terhadap keamanan nasional**, karena dapat melumpuhkan rantai logistik, menurunkan kepercayaan internasional, dan memicu instabilitas ekonomi.

Dalam kerangka Pagar Nusantara, maritime safety berfungsi sebagai **lapisan stabilisasi**, yang memastikan bahwa laut Indonesia tetap aman, tertib, dan dapat diprediksi. Hal ini dicapai melalui:

- a. Sistem navigasi modern
- b. Vessel Traffic Services (VTS)
- c. Pengawasan berbasis teknologi
- d. Integrasi data antarinstansi

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak selalu bersifat koersif, tetapi juga preventif dan manajerial.

4. Maritime Security: Penanggulangan Ancaman Nontradisional

Klaster ketiga dalam matriks Bueger adalah **Maritime Security**, yang secara spesifik merujuk pada upaya menghadapi ancaman nontradisional dan kriminal di laut, seperti:

- a. IUU fishing
- b. Perompakan dan perampokan bersenjata
- c. Penyelundupan narkoba dan manusia
- d. Terorisme maritim

Bueger menegaskan bahwa maritime security bersifat **lintas aktor dan lintas yurisdiksi**, sehingga tidak dapat ditangani oleh militer saja. Pandangan ini sangat sejalan dengan konsep Pagar Nusantara yang menekankan **pertahanan gabungan militer dan nonmiliter**.

Lukman Yudho Prakoso (2021) menyatakan bahwa ancaman nontradisional di laut Indonesia bersifat sistemik dan berkelanjutan, serta sering kali dimanfaatkan oleh aktor asing sebagai bagian dari strategi proxy. Oleh karena itu, maritime security harus dipahami sebagai bagian dari **strategi pertahanan nonlinier**, bukan sekadar penegakan hukum biasa.

Dalam Pagar Nusantara, maritime security dioperasionalkan melalui:

- a. Sinergi TNI, Bakamla, Polri, dan kementerian teknis
- b. Pemanfaatan intelijen maritim
- c. Pendekatan berbasis komunitas pesisir

Dengan demikian, Pagar Nusantara mengintegrasikan klaster maritime security Bueger ke dalam sistem keamanan nasional Indonesia.

5. Blue Economy: Dimensi Ekonomi dalam Keamanan Maritim

Klaster keempat adalah **Blue Economy**, yang sering kali diabaikan dalam diskursus keamanan tradisional. Bueger menegaskan bahwa aktivitas ekonomi laut—perikanan, energi, pariwisata, dan transportasi—memiliki hubungan langsung dengan keamanan maritim. Gangguan terhadap ekonomi laut akan memicu instabilitas sosial dan politik.

Bagi Indonesia, blue economy merupakan **kepentingan strategis nasional**. Prakoso (2022) menekankan bahwa kekayaan laut Indonesia yang melimpah justru menjadi sumber kerentanan apabila tidak dilindungi oleh sistem keamanan yang kuat. Fenomena IUU fishing dan eksploitasi ilegal sumber daya laut merupakan contoh nyata kegagalan pengamanan dimensi ekonomi maritim.

Dalam kerangka Pagar Nusantara, blue economy ditempatkan sebagai:

- a. **Objek yang harus dilindungi**
- b. **Sumber daya strategis nasional**
- c. **Fondasi Indonesia Emas 2045**

Dengan mengintegrasikan blue economy ke dalam arsitektur keamanan, Pagar Nusantara memastikan bahwa keamanan maritim tidak menghambat pembangunan, tetapi justru **menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**.

6. Integrasi Matriks Bueger dalam Konsep Pagar Nusantara

Keunggulan utama matriks Bueger adalah kemampuannya menjelaskan bahwa keempat klaster tersebut **tidak berdiri sendiri**, melainkan saling beririsan. Pagar Nusantara mengadopsi prinsip ini dengan menjadikan keamanan maritim sebagai **ekosistem strategis**, bukan sektor terpisah.

Dalam perspektif **grand theory**, matriks Bueger menyediakan landasan konseptual.

Dalam **middle theory**, ia memandu tata kelola dan kebijakan keamanan maritim.

Dalam **applied theory**, ia diterjemahkan menjadi patroli, pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi laut. Dengan demikian, Pagar Nusantara dapat dipahami sebagai **kontekstualisasi matriks keamanan maritim Bueger dalam realitas geopolitik Indonesia**.

C. Keamanan Maritim dalam Sistem Keamanan Nasional Indonesia

1. Kerangka Keamanan Nasional dan Laut

Keamanan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari **keamanan maritim** karena hampir seluruh aspek kehidupan strategis negara terhubung dengan laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki:

- a. Garis pantai ± 99.000 km
- b. Lebih dari 17.000 pulau
- c. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) $\pm 6,1$ juta km²

Keberadaan laut sebagai **ruang strategis** menjadikan keamanan maritim bukan hanya isu sektoral, melainkan **pilar utama keamanan nasional** (Prakoso, 2019).

Menurut Prakoso (2020), sistem keamanan nasional Indonesia harus dipahami melalui perspektif **pertahanan komprehensif**, yang mencakup:

- a. Perlindungan kedaulatan wilayah laut
- b. Pengelolaan jalur pelayaran dan chokepoints strategis
- c. Pengamanan sumber daya alam laut
- d. Penanggulangan ancaman tradisional dan nontradisional

Dengan demikian, keamanan maritim berperan sebagai **fondasi bagi stabilitas nasional**, sekaligus menjadi instrumen pertahanan rakyat semesta (*Sishankamrata*) di domain laut.

2. Ancaman Tradisional terhadap Laut Indonesia

Dalam konteks keamanan nasional, **ancaman tradisional** merupakan bentuk konvensional yang melibatkan:

- a. Invasi militer
- b. Pelanggaran wilayah perairan
- c. Pertikaian antarnegara atau konflik terbuka di laut

Kasus-kasus historis, seperti sengketa perairan dengan negara tetangga atau potensi infiltrasi di perbatasan laut, menunjukkan bahwa **kontrol fisik wilayah laut** tetap menjadi prioritas. Prakoso (2019) menekankan bahwa tanpa kehadiran militer yang kuat, ancaman tradisional dapat mengguncang **legitimasi kedaulatan Indonesia**.

Pagar Nusantara, dalam konteks ini, berfungsi sebagai:

- a. **Lapisan deterensi** untuk menahan agresi militer
- b. **Sistem pengawasan strategis** untuk mendeteksi pelanggaran awal
- c. **Instrumen proyeksi kekuatan** yang menegaskan kedaulatan

Kombinasi TNI AL, TNI AU, dan patroli nonmiliter (Bakamla, Polair, KKP) merupakan **arsitektur pertahanan multi-layered**, sehingga setiap ancaman tradisional dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

3. Ancaman Nontradisional dan Kompleksitas Keamanan Maritim

Selain ancaman tradisional, **ancaman nontradisional** menjadi tantangan yang semakin besar bagi keamanan nasional, meliputi:

- a. Ilegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing
- b. Perompakan dan kejahatan lintas negara
- c. Terorisme maritim
- d. Penyebaran narkoba dan perdagangan manusia

Menurut Bueger (2015), ancaman nontradisional bersifat **multi-aktor dan lintas yurisdiksi**, sehingga membutuhkan **pendekatan holistik**. Lukman Yudho Prakoso (2021) menambahkan bahwa

ancaman ini sering dikombinasikan dengan **proxy war**, cyber attack, dan teknologi drone, yang dapat mengganggu stabilitas nasional secara sistemik.

Pagar Nusantara mengintegrasikan ancaman nontradisional dengan cara:

- a. Pemanfaatan intelijen maritim berbasis AI
- b. Pemantauan drone dan satelit untuk deteksi dini
- c. Sinergi TNI, Bakamla, Polri, dan kementerian terkait
- d. Kolaborasi dengan masyarakat pesisir sebagai sumber informasi lokal

Dengan demikian, keamanan nasional tidak lagi dapat dipandang **sektor militer saja**, melainkan sebagai **ekosistem pertahanan gabungan** yang melibatkan kekuatan militer dan nonmiliter.

4. Hubungan Keamanan Maritim dan Stabilitas Ekonomi Nasional

Keamanan maritim berperan langsung dalam **stabilitas ekonomi nasional**. Jalur perdagangan internasional yang melewati Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan **arteri ekonomi global**. Gangguan terhadap lalu lintas laut ini dapat berdampak pada:

- a. Disrupsi logistik
- b. Kerugian ekonomi nasional
- c. Penurunan kepercayaan investor internasional

Prakoso (2022) menekankan bahwa keamanan maritim harus dianggap sebagai **security of prosperity**, bukan sekadar security of territory. Dengan menjaga laut tetap aman, Indonesia dapat:

- a. Memaksimalkan kekayaan laut (blue economy)
- b. Memastikan rantai pasok energi dan pangan
- c. Menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Dalam konteks Pagar Nusantara, sistem ini menjembatani antara **perlindungan kedaulatan** dan **optimalisasi sumber daya nasional**, sehingga keamanan maritim menjadi fondasi pembangunan Indonesia Emas 2045.

5. Keamanan Maritim dan Kedaulatan Nasional

Kedaulatan Indonesia di laut harus dipahami sebagai **hak dan kewajiban negara untuk mengatur, mengawasi, dan mengamankan seluruh ruang lautnya**. Hal ini mencakup:

- a. Penguasaan jalur pelayaran dan chokepoints strategis
- b. Pengelolaan ZEE dan wilayah perikanan
- c. Pengawasan pulau terluar

Pelanggaran terhadap kedaulatan maritim dapat berbentuk:

- a. Eksploitasi sumber daya ilegal
- b. Penetrasi militer asing
- c. Aktivitas kriminal lintas batas

Prakoso (2020) menyatakan bahwa tanpa **keamanan maritim yang efektif**, kedaulatan nasional akan terancam, terutama mengingat posisi geopolitik Indonesia yang berada di antara jalur perdagangan utama dunia.

Pagar Nusantara memastikan kedaulatan nasional melalui:

- a. **Deteksi dini** (radar, satelit, drone)
- b. **Respons cepat** (patroli gabungan militer dan nonmiliter)
- c. **Sistem hukum terpadu** (penegakan hukum laut dan sanksi ekonomi)

6. Integrasi Keamanan Maritim dengan Sistem Pertahanan Nasional

Keamanan maritim tidak berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dengan **sistem keamanan nasional secara keseluruhan**.

Lukman Yudho Prakoso (2019) menguraikan tiga dimensi integrasi:

- a. **Strategis (Grand Strategy)**. Pagar Nusantara menjadi bagian dari strategi besar pertahanan dan pembangunan nasional, termasuk penyusunan doktrin, anggaran pertahanan, dan kerjasama internasional.
- b. **Taktis (Middle Strategy)**. Implementasi patroli laut, pengawasan chokepoints, dan koordinasi antar-institusi.

- c. **Operasional (Applied Strategy).** Penggunaan AI, drone, cyber defense, dan intelijen untuk deteksi dini dan respons ancaman.

Melalui integrasi ini, keamanan maritim menjadi **elemen sentral** dalam menjamin ketahanan nasional Indonesia terhadap ancaman tradisional maupun nontradisional.

7. Tantangan Kontemporer dan Masa Depan

Ancaman keamanan maritim terus berevolusi. Dalam konteks global, tekanan negara besar, konflik sumber daya, serta teknologi baru seperti AI dan drone memperumit lanskap keamanan. Kasus serangan Amerika ke Venezuela, konflik Laut Cina Selatan, dan persaingan energi global menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak dapat diisolasi dari **lingkungan strategis global** (Prakoso, 2022).

Untuk itu, Pagar Nusantara menekankan:

- a. Sistem pertahanan adaptif
- b. Sinergi seluruh komponen nasional
- c. Integrasi keamanan, ekonomi, dan teknologi
- d. Peningkatan kapasitas intelijen dan analitik data

Keamanan maritim dalam konteks nasional menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga memastikan **Indonesia Emas 2045** dapat dicapai dengan aman dan berkelanjutan.

D. Pagar Nusantara dalam Perspektif Grand Strategy Nasional

1. Grand Strategy Nasional: Kerangka Dasar

Grand Strategy merupakan konsep perencanaan strategis jangka panjang yang menghubungkan **tujuan politik nasional, keamanan, ekonomi, dan diplomasi** dalam rangka memastikan kelangsungan dan kedaulatan negara. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, laut adalah unsur utama dari grand

strategy nasional karena hampir semua aspek geopolitik, ekonomi, dan pertahanan melekat pada **wilayah maritim** (Prakoso, 2019).

Prinsip dasar grand strategy meliputi:

- a. Penetapan prioritas nasional
- b. Alokasi sumber daya untuk keamanan, pertahanan, dan pembangunan
- c. Integrasi seluruh instrumen kekuatan nasional (militer, diplomasi, ekonomi, hukum, dan masyarakat)

Dalam kerangka ini, Pagar Nusantara dapat dipahami sebagai **arsitektur operasional grand strategy**, khususnya dalam domain maritim.

2. Pagar Nusantara sebagai Instrumen Grand Strategy

Pagar Nusantara bukan sekadar konsep pertahanan laut, tetapi **instrumen strategis untuk mewujudkan grand strategy nasional**. Ia menggabungkan dimensi:

- a. **Geografis:** Pulau terluar, jalur pelayaran strategis, ZEE, dan chokepoints
- b. **Teknologis:** Satelit, radar, drone, AI, sistem informasi geospasial, dan cyber defense
- c. **Kekuatan nasional:** TNI AL, Bakamla, Polri, KKP, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir

Menurut Prakoso (2020), integrasi ketiga dimensi ini memungkinkan Indonesia untuk:

- a. Mengantisipasi ancaman tradisional dan nontradisional
- b. Menegaskan kedaulatan wilayah laut
- c. Memastikan ketahanan ekonomi maritim dan stabilitas nasional
- d. Mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi strategis laut

Dengan demikian, Pagar Nusantara berperan sebagai **fondasi praktis grand strategy nasional** di domain maritim.

3. Strategi Pertahanan Berlapis dan Deterensi Global

Grand strategy maritim Indonesia menuntut **strategi pertahanan berlapis (layered defense)**, yang secara konseptual mencakup:

Lapisan luar (Outer Layer): Zona maritim jauh dari pulau-pulau utama, termasuk ZEE dan jalur laut internasional. Fungsi:

- a. Deterrence terhadap ancaman negara asing
- b. Pengawasan jarak jauh dengan satelit dan radar
- c. Kolaborasi internasional melalui kerja sama maritim

Lapisan menengah (Middle Layer): Selat, ALKI, dan perairan strategis di kepulauan. Fungsi:

- a. Kontrol lalu lintas laut
- b. Pencegahan perompakan dan penyelundupan
- c. Pemantauan aktivitas ekonomi dan keamanan

Lapisan dalam (Inner Layer): Pesisir, pulau terluar, dan pelabuhan strategis. Fungsi:

- a. Penegakan hukum
- b. Perlindungan objek vital nasional
- c. Integrasi masyarakat pesisir sebagai komponen pertahanan rakyat

Pendekatan ini sejalan dengan teori **grand, middle, dan applied** (Prakoso, 2021), di mana grand strategy menyediakan visi jangka panjang, middle strategy mengatur alokasi sumber daya dan kebijakan operasional, dan applied strategy mengeksekusi langkah-langkah taktis menggunakan teknologi dan kekuatan gabungan.

4. Pagar Nusantara dalam Konteks Lingkungan Strategis Global

Lingkungan strategis global mengalami perubahan cepat, ditandai oleh:

- a. Rivalitas negara besar (misal: AS, Cina, Rusia)
- b. Konflik perebutan sumber daya energi dan mineral
- c. Ancaman hibrida, termasuk cyber attack, drone warfare, dan proxy war

Contoh terkini adalah **serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela** yang memanfaatkan tekanan ekonomi, diplomasi, dan operasi militer terbatas untuk menguasai jalur energi. Fenomena ini menunjukkan bahwa **ancaman terhadap negara kepulauan bersifat multi-dimensi dan lintas domain**, bukan sekadar konvensional (Prakoso, 2022).

Pagar Nusantara berperan sebagai **instrumen grand strategy adaptif**, yang memungkinkan Indonesia untuk:

- a. Meminimalkan risiko intervensi asing
- b. Mengamankan jalur perdagangan dan energi strategis
- c. Meningkatkan resilience nasional terhadap ancaman hybrid dan nontradisional

Integrasi AI, drone, cyber defense, dan digitalisasi menjadi **komponen kunci strategi adaptif** ini, yang menjembatani keamanan maritim dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

5. Integrasi Militer dan Nonmiliter dalam Grand Strategy

Grand strategy modern menekankan bahwa **pertahanan tidak bisa hanya mengandalkan militer**. Pagar Nusantara menekankan konsep **pertahanan gabungan (joint defense)**, yaitu integrasi:

- a. **Kekuatan militer:** TNI AL, TNI AU, TNI AD (untuk pulau terluar dan pesisir)
- b. **Kekuatan nonmiliter:** Bakamla, KKP, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal
- c. **Teknologi dan intelijen:** C4ISR, AI, drone, cyber defense, big data

Menurut Prakoso (2020), kombinasi ini menciptakan **efek sinergis**, di mana setiap lapisan pertahanan mampu mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi ancaman secara cepat dan efektif. Pendekatan ini mendukung **grand strategy Indonesia** yang menekankan **kedaulatan, stabilitas, dan ketahanan nasional**, sekaligus memastikan pengelolaan kekayaan maritim secara berkelanjutan.

6. Pagar Nusantara dan Kedaulatan Ekonomi serta Sumber Daya Alam

Grand strategy maritim tidak hanya soal pertahanan militer, tetapi juga tentang **perlindungan sumber daya nasional**. Kekayaan laut Indonesia, termasuk:

- a. Perikanan
- b. Migas dan mineral laut
- c. Jalur pelayaran strategis
- d. Pariwisata bahari

merupakan bagian integral dari **strategi ekonomi nasional**. Prakoso (2022) menegaskan bahwa jika kekayaan maritim dibiarkan tanpa pengawasan, Indonesia akan rentan terhadap:

- a. Eksploitasi ilegal (IUU fishing)
- b. Penyelundupan sumber daya
- c. Dominasi asing terhadap jalur perdagangan

Pagar Nusantara menggabungkan aspek pertahanan dan ekonomi dalam satu sistem, memastikan bahwa keamanan maritim **mendukung pertumbuhan ekonomi nasional** sekaligus melindungi kedaulatan negara.

7. Relevansi terhadap Indonesia Emas 2045

Grand strategy Pagar Nusantara terkait erat dengan visi **Indonesia Emas 2045**, yaitu Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan mandiri. Keamanan maritim menjadi:

- a. Fondasi bagi ketahanan nasional
- b. Pra-syarat pengelolaan blue economy secara optimal
- c. Instrumen mitigasi risiko konflik global dan ancaman hibrida
- d. Pendukung stabilitas politik dan ekonomi jangka panjang

Dengan Pagar Nusantara, Indonesia dapat **memanfaatkan kekayaan maritimnya secara berkelanjutan** sambil tetap menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan gabungan, dan meminimalkan ancaman tradisional maupun nontradisional (Prakoso, 2021; 2022).

E. Kekayaan Maritim Indonesia sebagai Kepentingan Strategis Nasional

1. Laut Indonesia: Sumber Daya Strategis

Indonesia memiliki **kekayaan maritim yang melimpah**, baik dari segi sumber daya alam, jalur pelayaran, maupun ekosistem strategis. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa potensi ekonomi laut Indonesia mencapai **USD 400 miliar per tahun**, mencakup perikanan, energi, pariwisata bahari, dan transportasi (Prakoso, 2022).

Dalam perspektif keamanan nasional, kekayaan ini bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga **kepentingan strategis yang harus dijaga**. Ancaman terhadap sumber daya maritim dapat bersifat:

- a. **Tradisional**, seperti invasi atau pelanggaran wilayah
- b. **Nontradisional**, seperti IUU fishing, penyelundupan, dan perompakan
- c. Oleh karena itu, Pagar Nusantara menempatkan **perlindungan kekayaan maritim** sebagai salah satu pilar utama pertahanan negara.

2. Blue Economy dan Kepentingan Nasional

Konsep **Blue Economy** menekankan pemanfaatan laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki peluang strategis untuk menjadi **poros maritim dunia**, mengingat:

- a. Posisi geografis yang berada di jalur perdagangan internasional
- b. Wilayah ZEE ±6,1 juta km²
- c. Pulau-pulau terluar yang strategis

Menurut Prakoso (2022), integrasi antara **pengelolaan blue economy** dan keamanan maritim penting karena sumber daya laut yang tidak dijaga dapat dieksploitasi pihak asing atau kelompok